

Judul : Defisit APBN dan konsolidasi fiskal
Tanggal : Jumat, 21 Januari 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 15

Kontan Jumat, 21 Januari 2022

Opini

Defisit APBN dan Konsolidasi Fiskal

Krisis pandemi Covid 19 telah menyebabkan defisit anggaran dalam dua tahun terakhir ini meningkat tajam. *Fiscal rule* yang selama ini membatasi defisit harus di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) per tahun, dilonggarkan untuk mengatasi dampak kesehatan, sosial dan ekonomi akibat krisis pandemi virus korona Covid 19. Kebijakan defisit tersebut juga diambil untuk mendorong program pemulihan ekonomi agar perekonomian kembali bergerak dan pertumbuhan ekonomi kembali positif.

Kebijakan pemerintah tersebut mulai membatalkan hasil. Pandemi Covid 19 berangsur berkurang, aktifitas ekonomi kembali menggeliat dan pertumbuhan ekonomi kembali pulih. Kondisi yang semakin membaik ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan konsolidasi fiskal agar defisit dan indikator-indikator perekonomian lainnya kembali ke level semula seperti sebelum krisis pandemi.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan era konsolidasi fiskal diharapkan tercapai pada tahun 2023 mendatang. Kinerja positif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama tahun 2021 memunculkan optimisme akan terwujudnya konsolidasi fiskal yang lebih baik.

Kinerja positif tersebut bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terus meningkat dan mencapai target serta pengeluaran APBN yang semakin efisien. Meskipun beberapa program besar pemerintah seperti pembangunan Ibu Kota Negara baru hingga program vaksinasi massal membutuhkan anggaran yang sangat besar, namun pengelolaan APBN yang *prudent* dan hati-hati dapat mengurangi risiko dan beban fiskal di masa mendatang.

Terwujudnya konsolidasi fiskal tersebut tidak semudah membalikkan kedua belah tangan. Terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diwaspadai. Faktor penghambat tersebut bisa berasal dari domestik maupun global.

Faktor domestik yang perlu diwaspadai seperti masih menyebarnya virus Covid 19 terutama varian omicron, pemangkasan alokasi bantuan sosial atau bansos, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga potensi menyempitnya ruang fiskal akibat membengkaknya kebutuhan anggaran pemerintah yang sangat besar untuk membiayai program-program besar pemerintah.

Sementara itu, faktor global yang menghambat antara lain kebijakan peningkatan suku bunga



Mahpud Sujai,
Peneliti Senior Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

*Tulis merupakan pendapat pribadi the Fed, kerentanan pasar uang akibat kebijakan *tapering*, hingga lonjakan harga komoditas global akibat lonjakan permintaan internasional.

Konsolidasi fiskal yang ingin dicapai pada tahun depan adalah mengembalikan defisit kembali ke *fiscal rule* semula di bawah 3% terhadap PDB. Posisi tersebut kemungkinan besar dapat dicapai karena tingkat defisit yang terus menurun hingga diproyeksikan mencapai sekitar 4% pada tahun 2022 ini.

Defisit APBN tahun 2022 ini diproyeksikan akan berada di kisaran 4,3% hingga 4,8% dari PDB, lebih rendah dari target APBN 2022 yang sebesar 4,8% terhadap PDB. Proyeksi ini didorong penerimaan negara yang diperkirakan akan terus meningkat di samping dari implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) hingga kenaikan harga komoditas di tingkat global.

Selain itu, optimisme pemerintah juga didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali dan stabil sebagai bagian dari upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk menjaga kestabilan harga dan penawaran uang.

Kinerja pemerintah dan kondisi perekonomian yang semakin membaik pada tahun 2021 lalu memperkuat optimisme ini. Kondisi perekonomian dan kondisi fiskal pemerintah tahun

2021 merupakan titik balik dimana penerimaan negara yang diharapkan terus meningkat serta belanja negara yang lebih efektif dan efisien.

Dalam hal penerimaan negara, kunci dari konsolidasi fiskal adalah peningkatan penerimaan negara yang meliputi pertumbuhan rasio pajak serta optimalisasi penerimaan cukai. Hal ini dikarenakan sumber pengisi pundi-pundi negara yang terbesar saat ini berasal dari penerimaan perpajakan termasuk penerimaan bea cukai. Namun, penerimaan lain seharusnya juga lebih dioptimalkan terutama penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baik PNPB sumber daya alam, PNPB dari BUMN maupun PNPB dari Kementerian Lembaga dan Badan Layanan Umum atau BLU.

Peran Bank Sentral

Sementara itu, dalam hal belanja negara fokus pemerintah masih terus berupaya memperbaiki kon-

ty) yang lebih cepat. Belanja negara masih difokuskan pada sektor kesehatan dan bantuan sosial untuk masyarakat rentan agar dapat bangkit pasca krisis Covid-19.

Dalam sisi pembiayaan defisit, pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan besaran utang terutama dengan melibatkan bank sentral dalam pembiayaan anggaran. Keterlibatan bank sentral terutama dalam pembelian surat berharga negara (SBN) valuta asing (Valas) merupakan tindak lanjut dari fungsi bank sentral di pasar SBN valas atau *global bond*. Semua biaya terkait dengan pelaksanaan tugas penata usaha ditanggung oleh Bank Indonesia yang tetap berkomitmen untuk menjalankan fungsinya sebagai penata usaha dan pembayar imbalan SBN. BI tetap menjalankan fungsi yang ditugaskan Undang-undang kepada bank sentral untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengelola dan membiayai APBN.

Namun, dalam menjalankan beberapa kebijakan yang ditugaskan undang-undang, BI memiliki konsekuensi pada terbebannya neraca keuangan internal. Akan tetapi, beban terhadap neraca keuangan BI tersebut dapat diminimalisasikan dengan terjaganya rasio kecukupan modal ini serta cukup baiknya kinerja keuangan BI. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan pembagian beban (*burden sharing*) antara pemerintah dan BI dimana pemerintah dan BI berbagi beban untuk keberlanjutan fiskal sehingga beban APBN menjadi lebih ringan.

Berbagai implementasi kebijakan yang diterapkan dan indikator-indikator perekonomian yang terus membaik semakin memperkuat optimisme pemerintah dan pelaku pasar dalam mencapai konsolidasi fiskal pasca krisis Covid 19. Defisit yang terus terjaga dan didukung oleh penerimaan negara yang semakin meningkat serta belanja negara yang lebih efektif dan efisien akan memperkuat ketahanan fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi demi tercapainya masyarakat Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. ■

